

BAB III

PARTISIPASI KAUM BORO DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

TAHUN 2020 KABUPATEN WONOGIRI

3.1 Hak Pilih Masyarakat

Hak pilih merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Hak ini artinya memberikan kesempatan bagi setiap warga untuk bisa berpartisipasi dalam proses politik dengan memilih atau menentukan pemimpin dan wakilnya untuk melanjutkan pemerintahan di masa depan. Dalam konteks pemilihan umum, hak pilih tidak hanya sekedar kewajiban tapi juga merupakan bentuk keterlibatan aktif bagi masyarakat untuk menentukan bagaimana arah kebijakan pemerintahan di masa depan.

Setiap warga yang memenuhi syarat untuk memberikan hak pilihnya dalam sebuah pesta demokrasi, diwajibkan memberikan hak nya tersebut dengan tanpa adanya tekanan, intimidasi, ataupun diskriminasi. Dengan digunakannya hak pilih masyarakat dengan bijak maka akan sangat berpengaruh terhadap masa depan daerahnya, seperti yang diungkapkan Adinda dalam wawancara berikut

“Warga diberikan hak memilih ketika dilakukan pergantian pemimpin daerah ya karena sistem pemerintahan negara kita adalah negara demokrasi, dengan demikian rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara, dan menurut saya suara rakyat sangat penting untuk pergantian pemimpin karena ya suara rakyat hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang dianggap lebih mampu dalam memimpin dan memberi memperbaiki kebijakan yang kurang memadai sebelumnya.”

Hak pilih yang diberikan negara kepada rakyat untuk memberikan ruang bagi mereka agar dapat berpartisipasi menentukan kebijakan, namun tidak semua masyarakat memiliki hak ini berikut ini syarat bagi warga yang memperoleh hak untuk memilih :

- a. Calon pemilih berusia minimal 17 tahun pada hari pemungutan suara, dan apabila seseorang sudah menikah namun belum berusia 17 tahun maka tetap memiliki hak memilih.
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan karena mendapatkan putusan misalnya terkait suatu tindak pidana tertentu.
- c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil sebagai bukti identitas.
- d. Hal yang terpenting adalah memastikan sudah tercatat sebagai bagian dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang telah dikeluarkan oleh KPU.

Dalam proses pemberian hak pilih, setiap pihak mulai dari pemerintah, penyelenggaraan pemilu, serta masyarakat perlu menerapkan prinsip LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) guna memastikan suara yang diberikan ketika masyarakat memilih merupakan hasil murni yang mencerminkan kehendak rakyat. Namun realisasi ini sering kali di pengaruhi beberapa faktor seperti tingkat kesadaran politik masyarakat, aksesibilitas tempat pemungutan suara, serta transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu itu sendiri.

Oleh karena itu, mulai dari penyelenggara pemilu serta pemerintah perlu memastikan setiap warganya dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dan adil. Seperti yang diungkapkan Mellinia dalam wawancara bahwa kualitas hidup rakyat ini tergantung dengan bagaimana penggunaan hak pilih kita.

“Sebenarnya kita ini memang perlu menggunakan hak pilih ya, karena kualitas hidup rakyat tergantung dari pemimpin yang dipilih”

Namun saat ini, hak pilih yang diberikan dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat karena mereka menganggap bahwa perhitungan hasil suara dalam sebuah pemilihan sebagian besar bukan murni dari aspirasi dan hati rakyat. Seperti yang diungkapkan oleh Ratna pegawai swasta dalam wawancara yang menjelaskan bahwa sebenarnya hak pilih itu penting walaupun hasilnya tidak murni.

“Sebenarnya hak pilih itu penting jika digunakan secara semestinya, namun sekarang banyak suara rakyat yang bisa dibeli jadi sudah ngga obyektif”

Meskipun begitu, hak pilih yang didapatkan oleh masyarakat hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya karena memang tujuannya adalah untuk memilih pemimpin baru yang harapannya bisa memberikan perubahan positif dan mampu mendengarkan aspirasi rakyat dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Sino warga Wonogiri yang saat ini merantau di Bekasi untuk berdagang, berharap hak pilihnya bisa memberikan perubahan yang baik bagi daerahnya.

“Ya karena daerah kami butuh pemimpin yang baik dan membawa arah kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik dan lebih mapan”

Hal ini juga disampaikan Tiwi warga Wonogiri yang merantau untuk kuliah menyatakan jika hak yang diberikan negara ini merupakan cara bagi kita menentukan pemimpin kita ke depan.

“Penting, dikarenakan hak kita dapat menentukan siapa wakil yang terpilih agar dapat memiliki pemimpin yang berintegritas dan baik.”

Dengan menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, maka hal ini akan dapat menguntungkan diri sendiri juga karena negara memberikan kesempatan bagi warganya untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan mewakili kepentingan kita. Dengan memilih pemimpin dengan integritas tinggi, maka artinya warga berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang adil dan transparan. Perubahan positif bagi masyarakat akan mereka peroleh apabila mereka menggunakan hak suaranya dengan baik dan tepat.

3.2 Partisipasi Penggunaan Hak Memilih dari Kaum Boro dalam PILKADA 2020

Pelaksanaan PILKADA Tahun 2020 menjadi satu-satunya pemilihan yang berlangsung dalam kondisi yang tidak biasa, sebab pelaksanaannya terjadi saat Pandemi Covid 19. Dalam kondisi seperti ini, pasti Pemilihan akan berlangsung berbeda dari pemilihan yang sebelumnya dilaksanakan. Seperti halnya dalam rangka untuk mencegah penularan virus agar tidak cepat menyebar, maka diperlukan protokol kesehatan dalam proses pemilihan tersebut. Sebenarnya sebelum Pilkada tahun 2020 ini dilaksanakan, terdapat pro kontra diantara masyarakat karena banyak yang menilai mengenai perlukah Pilkada tetap

dilaksanakan di tengah pandemi yang terjadi, sebab saat itu tingkat kasus penularan cukup tinggi. Berikut ini salah satu tanggapan Adinda warga Wonogiri mengenai pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi.

“Menurut saya tepat atau tidaknya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 saat itu tergantung bagaimana persiapan dan pelaksanaannya dilakukan. pilkada disaat itu berpotensi terjadinya penularan virus yang lebih masif di tengah masyarakat. karena itu bisa ditunda hingga kondisi pandemi mereda dan memungkinkan dilakukan pilkada serentak.”

Hal inilah yang menjadi kendala bagi para pengguna hak pilih terutama bagi kaum boro yang bekerja diluar daerah tempat pilih mereka. Sebenarnya posisi mereka sebagai boro pun sudah menjadi kendala ketika pelaksanaan PILKADA berlangsung, karena berbeda dengan PEMILU yang berskala nasional seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang memperbolehkan masyarakat untuk pindah tempat memilih ketika mereka tidak berada di daerah tempat asal (daerah tempat memilih) mereka.

Ketika pelaksanaan pemilihan berlangsung, kebanyakan dari mereka (boro) tidak memberikan hak pilihnya dengan alasan tidak adanya informasi atau alasan karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dikota perantauan. Seperti yang diungkapkan Sino seorang pedagang yang merantau di Bekasi.

“Pemerintah harus memberikan informasi yang benar di setiap sudut rantau syukur di sediakan transportasi sehingga jarak dan waktu tidak terjadi kendala.”

Kegiatan pemilihan ini biasanya dilaksanakan pada hari kerja bukan saat *weekend* sehingga alasan karena pekerjaan menjadi hal yang lumrah. Seperti yang dikatakan oleh devi saat wawancara

“Saya tidak mengikuti atau berpartisipasi saat PILKADA saat itu dan bahkan di PILKADA tahun 2024 saya juga tidak berpartisipasi karena masih ada kerja di perantauan.”

Begitu pula yang disampaikan oleh Eva Tri Astuti seorang terapist yang bekerja di Jakarta selatan yang tidak bisa pulang memberikan hak pilihnya karena masih harus bekerja.

“Tidak, ya alasannya karena saya masih harus bekerja dan tidak ada hari libur saat itu. Jadi, saya tidak memilih (tidak memberikan hak pilih) saat itu.”

Karena banyaknya perantau yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada kebanyakan diakibatkan karena masih ada kerjaan di kota perantauan mereka. Sehingga dalam wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa warga yang memberikan usulan akibat dari kendala yang mereka hadapi ini. Salah satunya Ratna yang mengusulkan perpanjangan waktu dalam memilih.

“Mungkin bisa tuh TPS nya ditutup sore, cuman kasihan juga si sama pekerja TPS nya ngitung suaranya jadi molor”

Selain itu, Prima seorang pegawai swasta juga mengusulkan untuk memberikan jangka waktu libur yang lebih panjang atau pelaksanaan Pilkada yang diubah menjadi daring, mengingat waktu pelaksanaan pemilihan dilaksanakan pada hari kerja dan hanya diberikan waktu libur satu hari saja.

“Memberikan jangka waktu libur yang lebih banyak dapat menggunakan pemilu dan pilkada secara daring, bisa dilakukan online tapi dengan tetap mengedepankan asas LUBERJURDIL”

Hal yang sama diungkapkan oleh Adinda, seorang pegawai administrasi di pemerintah Surabaya yang mengatakan bahwa waktu menjadi kendala terbesar bagi perantau untuk bisa menyalurkan suaranya dalam Pilkada.

“Kendala terbesar sebagai perantau dalam menggunakan hak pilihnya bagi saya adalah waktu, apalagi jika dilaksanakan pada hari weekdays walaupun dihari itu tanggal merah, kalo istilah saya nanggung kalo pulang 1 hari dan pertimbangan jarak kota rantau.”

Kendala-kendala seperti ini yang didapatkan setiap tahun pemilihan berlangsung, apalagi di tahun 2020 yang dilaksanakan saat pandemi pasti akan lebih menimbulkan kekhawatiran karena dianggap dengan adanya pandemi pasti lebih banyak kendala yang dialami pemilih dan mempengaruhi jumlah partisipasi dari para pemilih.

Namun siapa sangka bahwa jumlah partisipasi pemilih pada saat PILKADA tahun 2020 di Kabupaten Wonogiri ini menjadi jumlah tertinggi bahkan rekor selama pelaksanaan PILKADA yang pernah dilakukan, bahkan dibanding dengan pelaksanaan Pilkada yang baru saja dilaksanakan pada Tanggal 27 November 2024 kemarin yang hanya menyentuh 69% partisipan. Sedangkan untuk jumlah partisipasi PILKADA tahun 2015 hanya mencapai jumlah partisipasi 66% dan jumlah partisipasi terbanyak justru berada pada tahun 2020 saat pandemi terjadi dengan jumlah partisipasi sebanyak 71,08%.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil survei dan wawancara dengan kaum boro, ditemukan bahwa tingkat partisipasi dipengaruhi oleh kendala dan hambatan berikut ini:

3.2.1 Keterbatasan mobilitas

Tingkat partisipasi kaum boro dalam kegiatan PILKADA tahun 2020 sangat dipengaruhi salah satunya oleh keterbatasan mobilitas yang terjadi pada

saat pandemi Covid tahun 2020 yang lalu. Pandemi Covid-19 ini menciptakan kondisi yang membuat banyak kegiatan masyarakat terhambat, salah satunya kegiatan rutin dari pemerintah untuk memilih pemimpin baru daerah. Pada saat itu juga sempat terganggu sehingga menjadi bahan pertimbangan apakah akan tetap dilakukan atau harus ditunda dulu menunggu hingga wabah mulai mereda. Hingga pada akhirnya pemerintah memilih untuk tetap melaksanakan pesta demokrasi ini dengan berbagai pertimbangan, walaupun menyebabkan pro dan kontra di tengah masyarakat karena pada saat itu penularan virus di Indonesia yang cukup tinggi.

Akibatnya, hal ini menjadi tantangan baru bagi mereka yang saat itu merantau untuk bekerja karena mereka sebagai warga negara Indonesia yang diberikan hak untuk memilih pemimpin baru, maka mau tidak mau karena ini adalah pemilihan kepala daerah maka untuk bisa menyalurkan hak pilih, mereka harus pulang kampung dimana tempat mereka terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Hal yang menjadi kekhawatiran bagi perantau untuk bisa mudik (kembali ke daerah asal mereka) adalah bagaimana ketika mereka melakukan perjalanan pulang karena risiko kesehatan pun juga dipertaruhkan di jalan. Mereka perlu memikirkan dan menjaga agar tidak tertular virus serta tidak membawa virus tersebut ke kampung yang bisa saja menularkan keluarga yang ada di rumah. Jadi kekhawatiran mereka bukan hanya pada diri sendiri, tetapi ancaman kesehatan bagi keluarga dan masyarakat di kampung halaman juga menjadi pertimbangan. Faktor inilah yang menyebabkan sebagian perantau

memilih untuk tidak pulang dan menetap dulu di kota perantau sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya dalam PILKADA.

Selain karena faktor kesehatan akibat pandemi, ada alasan lain yang menyebabkan partisipasi perantau cenderung rendah, dan hal ini menjadi alasan umum ketika Pilkada berlangsung di tahun-tahun sebelumnya. Jarak dan aksesibilitas serta alasan waktu dan pekerjaan menjadi alasan umum bagi perantau yang tidak bisa hadir memberikan hak pilihnya ketika Pilkada. Banyak dari kaum boro yang memutuskan merantau ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan mereka jauh dari daerah asal, sehingga akan sulit bagi mereka untuk kembali ke kampung halaman hanya untuk memberikan hak suara dalam Pilkada. Selain itu, sulit bagi mereka untuk mengambil cuti serta kesibukan pekerjaan mereka yang menjadi hambatan utama bagi kaum boro untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Meski begitu, sebagian perantau yang lain memiliki pemikiran yang berbeda karena mereka justru memilih untuk pulang ke kampung halaman. Alasan mereka memilih untuk pulang adalah karena rata-rata di kota tempat perantauan mereka banyak yang menerapkan pembatasan. Seperti halnya di daerah Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Kebijakan ini sering kali membatasi mereka dalam berkegiatan tak terkecuali dalam bekerja. Akibat dari pandemi dan pembatasan ini, menyebabkan banyak warga yang kehilangan pekerjaannya karena terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga banyak pebisnis banyak yang harus gulung tikar imbas dari pandemi covid-19.

Pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah menyebabkan peluang usaha, aktivitas dan kegiatan sehari-hari akan terganggu sehingga banyak masyarakat perantau yang lebih memilih untuk pulang kampung.

Pulang ke kampung halaman disaat pembatasan diberlakukan dianggap sebagai keputusan yang lebih baik oleh sebagian masyarakat karena selain lebih banyak aktivitas yang bisa dilakukan di desa, warga juga bisa berkumpul bersama keluarga. Selain adanya pembatasan, faktor yang menyebabkan banyak warga perantau bisa pulang ke kampung halaman adalah karena di saat itu banyak pekerjaan yang dilakukan secara online atau *work from home* (WFH) sehingga mereka bisa tetap melaksanakan pekerjaan mereka meskipun sedang dirumah.

3.2.2 Protokol kesehatan

Pelaksanaan PILKADA di tengah kondisi pandemi covid-19 membawa perubahan yang cukup signifikan dibanding dengan pelaksanaan PILKADA ditahun-tahun sebelumnya, karena dilaksanakan dengan kondisi normal. Ditengah pandemi ini memaksa adanya penyesuaian yang bertujuan menjaga kesehatan serta mengurangi adanya penularan virus seluruh pihak yang terlibat, baik petugas pemilihan, pemilih, maupun masyarakat secara umum. Maka dari itu penyesuaian yang dilakukan adalah dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat.

Seluruh tahapan pemilihan mulai dari kampanye hingga pemungutan suara dijaga dengan ketat dan harus memenuhi protokol kesehatan yang berlaku

guna mengurangi penyebaran virus. Kampanye yang biasa dilakukan saat pemilihan berlangsung adalah dengan mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar dengan intensitas waktu yang cukup lama untuk sekali kampanye dan pada saat itu kampanye dilakukan secara daring dengan tujuan agar tidak menambah penyebaran virus covid-19. Pada saat itu banyak juga warga yang secara jelas menunjukkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon dan memanfaatkan media online sebagai cara untuk mengajak masyarakat lain untuk ikut mendukung calon yang di maksud. Seperti halnya Eva Tri Astuti yang menceritakan bahwa dia mengikuti kampanye mendukung salah satu pasangan calon saat itu.

“Partisipasi lewat story WA karena saat itu keluarga kami mendukung Pak Jekek. Sese kali saya ikut berpartisipasi lewat story WA, karena berharap juga semoga teman, sanak, bahkan saudara yang melihat postingan saya juga ikut serta memilih calon PILKADA yang dimaksud.”

Lalu di TPS (Tempat Pemungutan Suara), protokol kesehatan mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, kewajiban dalam penggunaan masker, penyediaan fasilitas cuci tangan sebelum memasuki ruang, serta pengaturan jarak antar pemilih menjadi keharusan pada proses pemilihan saat itu.

Selain itu, logistik serta teknik pelaksanaan juga mengalami penyesuaian. Mulai dari surat suara, bilik suara, dan peralatan lainnya harus disterilkan terlebih dahulu. Bahkan jumlah pemilih harus dibatasi dalam setiap TPS. Setiap TPS membuat jadwal bagi setiap pemilih untuk memberikan jadwal harus datang di jam berapa agar tidak terjadi kerumunan saat pemilihan berlangsung,

sehingga disaat itu pemilihan dilangsungkan dengan membagi sesi bagi pemilih. Semua hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat agar mereka bisa datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya walaupun ditengah kondisi yang tidak biasa itu.

Meskipun banyak hal sudah dilakukan oleh pemerintah agar pelaksanaan PILKADA tetap terlaksana, masih banyak masyarakat yang enggan untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya karena mereka merasa ragu dan khawatir akan risiko paparan virus. Kekhawatiran ini semakin diperparah karena adanya informasi jika paparan virus semakin melonjak, sehingga hal ini menjadi pertimbangan masyarakat untuk berpikir ulang untuk keluar rumah atau tidak, termasuk untuk memberikan hak pilih mereka dalam PILKADA.

Selain karena faktor kesehatan, adanya kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan dianggap menyulitkan sebagian orang. Hal Ini terjadi karena mereka yang belum bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru sehingga mereka merasa tidak nyaman dengan aturan atau kebijakan baru di tengah pandemi saat itu. Mereka menganggap bahwa proses pemilihan yang biasa mereka lakukan sangat sederhana dan berlangsung cukup singkat dan saat itu berubah menjadi lebih kompleks dan memakan waktu yang relatif lebih lama karena perlu melalui tahapan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.

Meskipun penerapan protokol kesehatan dilakukan demi kebaikan bersama, namun dampaknya bagi partisipasi pemilih jelas tidak dapat diabaikan terkhusus bagi kaum boro atau perantau. Bagi mereka, keputusan untuk berpartisipasi

dalam PILKADA Tahun 2020 bukan hanya dipengaruhi oleh preferensi politik saja, namun juga pertimbangan akan kesehatan dan kenyamanan yang dihadapi selama pandemi covid-19.

Dengan adanya perubahan-perubahan ini, PILKADA di tengah pandemi covid-19 ini bukan hanya menjadi momen untuk melihat bagaimana kesiapan teknis penyelenggaraan pemilihan melainkan juga untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat sebagai pemilik hak pilih dalam menjalankan tanggung jawab demokrasinya di tengah kondisi yang serba tidak pasti. Sehingga faktor-faktor inilah yang menjadi alasan yang secara tidak langsung menentukan dinamika partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di tengah kondisi darurat kesehatan global.

3.2.3 Informasi yang terbatas

Dalam pelaksanaan proses pemilihan, penting bagi setiap pemilih untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana pemilihan itu berlangsung. Mulai dari siapa saja calonnya, bagaimana visi misi yang setiap pasangan calon tawarkan, kapan pelaksanaan pemilihan, hingga bagaimana tata cara atau prosedur dalam memberikan suara di TPS. Dengan mendapatkan informasi yang memadai terkait pelaksanaan pemilihan, maka akan mendorong setiap pemilik hak suara untuk dapat berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab serta dapat memberikan suara dengan lebih tepat. Adinda juga menyatakan dalam wawancara terkait pentingnya informasi dalam pemilihan.

“Media dan kampanye politik memiliki peran yang besar dalam membentuk keputusan untuk berpartisipasi dalam pilkada, untuk saya

tergantung dari informasi yang diberikan, informasi yang jelas relevan dan transparan dapat membuat lebih tertarik untuk berpartisipasi sementara informasi yang tidak akurat, kampanye negatif malah mempengaruhi atau membuat tidak tertarik untuk berpartisipasi”

Bagi warga sebagai pemilik hak suara, memahami kualitas setiap pasangan calon yang maju menjadi hal yang cukup krusial sebelum mereka menentukan pilihannya. Untuk bisa menentukan pilihan yang tepat, mereka perlu tahu rekam jejak sosok calon pemimpin mereka, bagaimana latar belakangnya, pengalamannya, serta apa saja program kerja yang mereka tawarkan apabila mereka terpilih untuk memimpin daerah nantinya. Informasi yang akurat serta objektif sangat diperlukan bagi setiap pemilih, agar mereka bisa memilih bukan hanya karena popularitas dari setiap pasangan calon atau karena adanya tekanan sosial dari luar akan tetapi berdasarkan pertimbangan yang matang dan rasional. Maka dengan begitu, pemimpin yang telah terpilih nantinya dapat mengemban amanah dengan baik yang diharapkan dapat menjalankan kebijakan yang selalu berpihak kepada rakyat serta mampu membawa perubahan positif bagi daerah yang mereka pimpin selama lima tahun ke depan.

Namun dalam pelaksanaannya, khususnya pada Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19, banyak pemilih yang kesulitan untuk mendapat informasi terkait pemilihan bupati dan wakil bupati pada saat itu. Seperti yang diungkapkan prima dalam wawancara ketika ditanyakan mengenai informasi terkait pemilihan.

“Kurang sebenarnya, tidak ada informasi yang gencar dari media masa. Karena informasi ini ya, sangat berpengaruh jadi tau kalau ada orang - orang yang kurang berkualitas untuk menjadi pemimpin”

Diakibatkan pandemi ini, menyebabkan berbagai keterbatasan seperti pembatasan sosial, adanya larangan melakukan kampanye terbuka dalam skala besar, hingga interaksi langsung antara calon dengan masyarakat yang juga dibatasi. Kampanye yang biasa dilakukan biasanya melibatkan banyak orang yang dilakukan dengan cara berdiskusi dengan kelompok atau komunitas masyarakat, sosialisasi, maupun dalam bentuk pesta rakyat yang pasti menyebabkan kerumunan di tengah masyarakat. Kemudian pada tahun 2020 kampanye ini harus beralih ke platform daring yang tidak semua warga bisa mengakses dengan mudah. Selain itu, banyak dari warga yang lebih memfokuskan diri pada kesehatan masing-masing karena tingginya kasus penularan saat itu serta banyak warga yang kehilangan keluarganya akibat terjangkit virus covid-19.

Akibat dari kurangnya informasi dan peralihan menjadi sistem daring menyebabkan banyak kelompok masyarakat yang kurang melek teknologi akan merasa kesulitan dalam mendapatkan informasi mendalam mengenai calon yang akan mereka pilih. Kurangnya informasi ini akan berdampak signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilih, karena mereka merasa enggan dan ragu untuk memilih karena mereka merasa tidak tahu menahu atau tidak kenal dengan pasangan calon yang maju. Apabila pemilih memberikan suaranya dengan tidak 'kenal' dengan calonnya maka yang dikhawatirkan pemimpin

yang terpilih tidak sepenuhnya mencerminkan bagaimana harapan dan aspirasi dari masyarakat.

Jika kita melihat bagaimana informasi terkait pemilihan, pasti akan lebih mudah bagi kita untuk mendapat informasi terkait pemilihan umum seperti halnya pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini terjadi karena pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan pemilihan secara nasional sehingga informasi terkait kampanye, debat publik, tata cara pemilihan akan disiarkan secara nasional misalnya di channel tv publik sehingga mudah bagi masyarakat mendapatkan informasi terkait pemilu tersebut dibandingkan dengan pilkada yang hanya diperuntukkan bagi daerah masing-masing.

Oleh karena itu, dalam situasi yang seperti ini maka diperlukan upaya dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, serta bantuan dari media untuk dapat memastikan bahwa segala informasi terkait pemilu bisa diterima dan disampaikan secara luas bagi masyarakat. Pemanfaatan berbagai jenis media seperti televisi, koran, radio, dan media sosial perlu dimaksimalkan karena dengan semua media tersebut maka akan lebih mudah menjangkau segala tingkatan dan kalangan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Mellinia saat ditanya dalam wawancara apakah media sosial berpengaruh terhadap keputusannya dalam pilkada.

“Iya, karena saat ini semua informasi didapat dari sosial media”

Perlunya kerja sama dengan media lokal akan lebih membantu pemerintah untuk menyebarkan informasi lebih luas, sehingga setiap pemilih

nantinya akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam memahami calon pemimpin yang akan mereka pilih. Dengan begitu, meskipun dihadapkan dengan keterbatasan akibat pandemi, pemilu akan dapat berlangsung dan diharapkan suara yang diberikan oleh setiap pemilih benar-benar mencerminkan pilihan yang sadar dan bertanggung jawab.

3.2.4 Kondisi ekonomi

Pandemi menjadi masa yang paling sulit bagi kondisi ekonomi masyarakat di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Dampak akibat pandemi ini cukup luas, mulai dari sektor usaha besar hingga pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian. Perusahaan besar banyak mengalami penurunan pendapatan hingga kerugian akibat adanya pembatasan aktivitas ekonomi. Hal ini akhirnya berdampak pada adanya kebangkrutan hingga banyak yang menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Bagi pekerja informal, situasi saat itu menjadi lebih berat karena di dalam pekerjaannya mereka tidak menerima jaminan pendapatan tetap atau jaminan akan keamanan kerja. Sedangkan untuk pedagang kecil, ojek online, buruh lepas, dan pekerja sektor jasa lainnya mengalami penurunan konsumen hingga pendapatan yang mereka peroleh tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sementara itu, masyarakat yang saat itu bergantung pada usaha kecil dan menengah juga ikut terdampak karena daya beli dari konsumen yang semakin menurun sehingga mengakibatkan perputaran ekonomi menjadi semakin lambat.

Selain banyak yang kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan, pandemi ini juga menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan. Harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, dan biaya kesehatan yang meningkat karena tingginya kasus hingga sulit untuk mencari alat kesehatan seperti tabung oksigen, masker, dan kamar bagi keluarga yang terjangkit. Selain itu karena tingginya PHK banyak masyarakat kesulitan untuk mencari pekerjaan baru yang membuat semakin terhimpit ditengah kondisi pandemi kala itu. Banyak keluarga yang harus beradaptasi dengan kondisi ini, termasuk dalam mengurangi jumlah pengeluaran mereka, kemudian mencari pekerjaan alternatif atau mungkin bagi mereka yang merantau memutuskan kembali ke kampung halaman untuk dapat bertahan hidup.

Bagi perantau yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan di tengah pandemi berarti mereka harus memikirkan ulang prioritas mereka, termasuk dalam hal pulang kampung untuk menggunakan hak pilih mereka pada Pilkada yang pada saat itu tetap dilangsungkan di tengah pandemi. Mereka harus mempertimbangkan berbagai hal untuk hal itu seperti biaya perjalanan yang tidak sedikit apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Seperti halnya yang dikatakan oleh Eva yang menyatakan jika untuk bisa pulang ke kampung halaman, perlu uang yang tidak sedikit.

“Biaya mudik kurang lebih 500 hanya untuk transportasi waktu itu. Belum oleh-oleh untuk keluarga. Seandainya difasilitasi biaya MUDIK pasti saya akan pulang dan ikut partisipasi PILKADA. Kepada Bapak Pemerintah jika kami para perantau diikutsertakan untuk wajib ikut PILKADA nanti kedepannya minta tolong untuk difasilitasi mudik gratis.”

Tingginya biaya perjalanan untuk pulang kampung mengakibatkan banyak dari mereka yang memilih untuk menetap di kota perantauan mereka dan memilih untuk mengalokasikan dana untuk kebutuhan sehari-hari mereka dibandingkan untuk pulang hanya untuk memberikan suara di Pilkada. Selain itu, ketidakpastian ekonomi saat itu membuat perantau lebih fokus bertahan dengan mencari penghasilan tambahan sehingga banyak dari mereka kurang memberi perhatian terhadap Pilkada yang akan berlangsung.

Disisi lain, Ada sebagian perantau yang memilih untuk pulang kampung karena mereka menganggap bahwa biaya hidup akan lebih mudah di desa dibandingkan dengan di tempat mereka merantau, selain itu apabila mereka di kampung pasti mendapat dukungan juga dari keluarga. Dari hal inilah yang justru mendorong mereka untuk berpartisipasi memberikan hak pilihnya dalam Pilkada dengan harapan pemimpin baru yang terpilih mampu membawa perubahan, khususnya dalam kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil.

Dengan demikian, faktor ekonomi ini sangat berpengaruh dalam menentukan partisipasi kaum boro dalam Pilkada Tahun 2020 saat itu. Situasi krisis yang mereka hadapi saat itu mendorong sebagian masyarakat untuk memberikan hak pilihnya karena kondisi ekonomi di tempat perantauan yang menyebabkan mereka memilih pulang kampung. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi keterlibatan politik masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.3 Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Kaum Boro

Sebagaimana konsep yang disampaikan oleh **Lester Walter Milbrath**, hal-hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi kaum boro dalam pemilihan kepala daerah di klasifikasikan menjadi 3 faktor sebagai berikut :

3.3.1 Faktor stimulasi politik

Stimulasi politik memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat partisipasi politik masyarakat. Faktor ini berkaitan erat dengan tiga hal, yaitu kesadaran politik, kepentingan politik dan kepercayaan politik. Kesadaran politik ini mengacu pada pemahaman masyarakat terkait pada sistem politik, peran mereka dalam demokrasi, serta bagaimana dampak dari keputusan politik terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang tinggi akan cenderung lebih aktif dalam pemilu. Mereka pasti akan memahami peran mereka dalam pelaksanaan pemilu serta bagaimana partisipasi mereka ketika pemilu tersebut akan mempengaruhi kebijakan politik kedepan. Salah satu contoh yang penulis dapatkan dalam sebuah wawancara pada seorang warga perantau asal Wonogiri

“Menurut saya memberikan hak suara dalam pilkada atau pemilu sangat penting karena dengan memberikan suara kita turut berperan aktif dan berkontribusi dalam memilih pemimpin yang akan mengurus masa depan politik, sosial dan ekonomi daerah kita”

Sementara itu, kepentingan politik juga menjadi faktor utama dalam mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam politik atau dalam

pelaksanaan pemilu. Masyarakat akan lebih cenderung berpartisipasi apabila kebijakan yang diambil oleh pemerintah memiliki keterkaitan dan dampak langsung terhadap mereka. Seperti yang disampaikan Prima dalam wawancara, bahwa ia dengan jujur menyatakan bahwa dalam pilkada tahun 2020 ia menggunakan hak pilihnya karena ada kepentingan yang memang ia inginkan dari salah satu calon saat itu.

“Iya, karena saat itu bupati Wonogiri yang saat PILKADA tahun 2020 mencalonkan kembali memberikan program beasiswa bagi mahasiswa dan saat itu saya masih kuliah. Jadi saya memutuskan pulang supaya bisa memilih, karena saya berharap dapat beasiswa lagi.”

Pasangan calon bupati saat Pilkada tahun 2020 salah satunya adalah Bapak Joko Sutopo atau yang akrab disapa sebagai Pak Jekek dan wakilnya Bapak Setyo Soekarno ini memiliki program pemberian beasiswa berprestasi kepada mahasiswa asal Wonogiri. Beasiswa ini berupa pemberian uang sejumlah 12 juta setiap penerimanya yang dapat digunakan selama 1 tahun. Program beasiswa ini sebenarnya sudah berlangsung dari tahun 2016 yang merupakan program dari Bupati pada periode tersebut yaitu Bapak Joko Sutopo yang kemudian mencalonkan kembali pada Pilkada tahun 2020.

Selain itu, kepercayaan politik juga menentukan sejauh mana masyarakat percaya pada pemerintah, institusi politik, dan proses demokrasi yang berlangsung. Apabila masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah dan sistem politik yang ada, maka potensi mereka

berpartisipasi baik dalam pemilu maupun dalam bentuk aktivitas politik yang lain juga akan lebih tinggi.

Dengan demikian, faktor stimulasi yang mencakup kesadaran, kepentingan, serta kepercayaan politik berperan cukup besar dalam menentukan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses politik. Apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, kepentingannya terwakili serta percaya dengan sistem politik yang ada maka tingkat partisipasi politik akan meningkat dan dapat menciptakan demokrasi yang lebih dinamis dan sehat.

3.3.2 Faktor karakteristik sosial

Karakteristik sosial ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial yang dapat mendorong atau bahkan menghambat seseorang untuk ikut serta dalam proses politik. Dua aspek utama yang berperan dalam hal ini adalah keberadaan kelompok sosial dan juga aspek lingkungan tempat tinggal. Kedua faktor ini dapat mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam Pilkada atau tidak karena kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, dan juga kecenderungan untuk menentukan akan aktif atau justru pasif dalam kegiatan politik.

3.3.2.1 Kelompok sosial

Tidak bisa dipungkiri bahwa tergabung dalam sebuah kelompok sosial atau komunitas akan dapat merubah pola pikir atau pandangan terhadap sesuatu. Maka dari itu, tergabung dalam sebuah kelompok sosial atau komunitas juga bisa mempengaruhi pola pikir anggotanya sehingga dapat

membentuk kesadaran akan politik. Kelompok sosial seperti komunitas perantau, organisasi keagamaan, atau tergabung dalam perkumpulan warga dari daerah asal biasanya cenderung memiliki akses lebih besar terhadap informasi politik. Salah satunya Tiwi ketika ditanya Mengenai pihak yang memberikan informasi terkait pelaksanaan Pilkada.

“Terdapat pihak yang memberikan informasi dari wakil RT di desa saya.”

Walaupun berada di perantauan, informasi terkait pilkada masih di dapatkan karena masih berhubungan dengan daerah asal dan tergabung dalam sebaliknya orang yang di perantauan tapi tidak tergabung dalam kelompok atau komunitas pasti akan memberikan keuntungan yang lebih besar dalam hal memperoleh informasi yang lebih lengkap serta dapat memperkuat suara mereka dalam Pilkada.

Meskipun peran kelompok sosial atau komunitas sangat penting dalam mempengaruhi pola pikir kita terkait politik, namun ada beberapa orang yang memang memiliki kesadaran dari diri sendiri untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik khususnya dalam menyalurkan hak pilihnya. Kesadaran ini dapat terbentuk dari pengalaman pribadi, pendidikan, maupun dari pemahaman mendalam mengenai pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Selain itu, kesadaran ini juga bisa timbul dari rasa kepedulian terhadap kampung halaman mereka ataupun karena adanya

kepentingan pribadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan oleh Prima yang ikut berpartisipasi dalam Pilkada dengan tanpa ada pihak lain yang mempengaruhi keikutsertaannya dalam kegiatan politik tersebut

“Ngga ada pihak lain yang mempengaruhi, ya cuma atas hati nurani saja”

Secara keseluruhan, meskipun tergabung dalam sebuah kelompok sosial atau komunitas memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi politik, namun ada beberapa individu yang secara sadar memilih dan ikut serta dalam Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi bukan hanya tentang adanya pengaruh sosial, namun juga tentang keputusan pribadi yang didasari oleh pemahaman mengenai pentingnya hak pilih dalam demokrasi.

3.3.2.2 Lingkungan tempat tinggal

Selain kelompok sosial, lingkungan tempat tinggal juga dapat berperan dalam menentukan tingkat partisipasi kaum boro dalam Pilkada. Lokasi tempat tinggal dan kondisi social budaya di sekitar tempat tinggal mereka dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang tersebut terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah. Apabila mereka tinggal di lingkungan dengan budaya partisipatif yang tinggi atau sering terlibat dalam kegiatan politik, hal ini bisa menjadi motivasi untuk mereka mau ikut

berpartisipasi dalam pemilihan. Namun sebaliknya apabila lingkungan di perantauan tidak mendukung dalam hal politik maka keinginan berpartisipasi akan rendah.

Hal diatas dilihat dari faktor tempat tinggal mereka di kota perantauan, namun apabila dilihat dari faktor tempat tinggal mereka di kampung halaman, faktor dari pemerintah daerah juga bisa menjadi pendorong kaum boro untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Salah satunya karena adanya dukungan dari pemerintah daerah yang mungkin memberikan kemudahan perantau dalam proses pemilihan seperti menyediakan informasi terkait cara menyalurkan suara mereka. Hal ini dapat mendukung partisipasi politik perantau dalam pilkada.

Selain itu, adanya keterikatan emosional dengan daerah asal juga akan memberi pengaruh bagi perantau untuk ikut serta berpartisipasi dalam Pilkada. Seperti halnya Gress dalam sebuah wawancara saat ditanya mengenai rasa keterikatan emosional dengan daerah asal yang mempengaruhi partisipasinya dalam sebuah pemilihan.

“Pasti ada rasa tanggung jawab sebagai warga dengan memberikan suara merupakan tanggung jawab sosial, sehingga saya perlu berpartisipasi dalam pemilihan demi kemajuan daerah dan dengan inilah cara kita menunjukkan kepedulian terhadap kondisi politik di daerah”

Hal yang berbeda bisa juga terjadi pada perantau yang memilih untuk tidak memberikan hak pilihnya, salah satu alasannya

karena mereka merasa kehidupan di perantauan merek jauh lebih baik daripada tempat tinggal mereka di kampung halaman. Seperti halnya yang disampaikan oleh Mellinia saat ditanya apakah lingkungan di kampung halaman bisa mempengaruhinya dalam memberikan suara saat Pilkada.

“Tidak, karena saya tidak memberikan hak suara saya saat Pilkada, dan saya merasa kehidupan di perantauan lebih baik”

Bagi sebagian perantau, kehidupan di kota perantauan memberikan kesempatan yang jauh lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Merek mungkin merasa bahwa di daerah asal mereka tidak memberikan peluang yang sama untuk kemajuan dan pengembangan diri. Sehingga dengan kondisi ini, perantau cenderung merasa bahwa Pilkada di daerah tempat tinggal mereka terasa tidak relevan dengan kehidupan mereka saat ini.

3.3.3 Faktor karakteristik situasional

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat perantau dalam Pilkada adalah kondisi politik yang pada saat itu juga dalam kondisi pandemi. Terjadi Ketegangan antara kebijakan kesehatan dan ekonomi, serta adanya tantangan dalam menjaga partisipasi dan kepercayaan publik. Banyak menjadi perdebatan diantara masyarakat tentang urgensi pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi covid-19 yang saat

itu terjadi. Hal ini menjadi pertanyaan bagi penulis kepada salah satu informan mengenai persoalan tepatkah Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi, dan hal ini dijawab oleh Prima salah satu warga Wonogiri yang merantau dan bekerja sebagai karyawan swasta.

“Kalau itu sudah waktunya pemungutan suara menurut saya tidak apa apa, banyak teknologi dan cara yang dapat dilakukan oleh panitia pemungutan suara untuk mencegah kerumunan akan tetapi jika tidak memungkinkan dari segi biaya dan kondisi. hal ini dapat dipertimbangkan untuk mundur”

Hal yang sama disampaikan oleh Eva Tri Astuti dan Sampurno terkait pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi.

“Sah-sah saja, asal saling menjaga jarak dan tidak lupa pakai masker” Eva Tri Astuti

“Tepat, karena sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang penting protokol kesehatan tetap dilaksanakan” Sampurno

Namun ada yang memiliki pendapat yang berbeda terkait hal ini, seperti yang disampaikan oleh Ratna saat ditanyakan hal yang sama.

“Not best decision, karena uang yang dipakai untuk pemilu bisa dialihkan untuk mengatasi wabah”

Menurutnya, uang yang digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada bisa digunakan untuk hal lain, karena melihat jumlah kasus yang saat itu cukup tinggi. Pandemi menyebabkan adanya pergeseran prioritas di kalangan masyarakat termasuk perantau. Permasalahan seperti kesehatan dan ekonomi menjadi hal yang lebih mendesak dibandingkan isu-isu politik.

Berdasarkan ketiga faktor diatas, Milbrath mengkategorikan tingkatan partisipasi masyarakat menjadi beberapa tingkatan. Pertama apatis, yaitu

individu yang tidak terlibat sama sekali dalam politik, kedua *spectators* atau penonton yaitu individu yang hanya melakukan partisipasi minimal seperti memilih atau hanya sekedar mengikuti berita politik. Tingkatan terakhir adalah *gladiators* atau seorang aktivis yaitu seseorang yang terlibat secara aktif dalam politik seperti menjadi relawan kampanye atau bergabung dalam sebuah partai politik. Teori yang dikemukakan oleh Milbrath ini membantu menjelaskan mengapa sebagian dari mereka aktif memberikan hak pilihnya (*spectators*) dan sebagian lainnya yang tidak berpartisipasi (*apatis*). Perantau yang memilih untuk pulang kembali ke kampung halaman untuk memberikan hak pilihnya masih masuk dalam kategori *spectators*, meskipun terkendala biaya atau keterbatasan dalam hal lain. Sedangkan perantau yang tidak memilih dapat dikategorikan sebagai *apatis*, terutama jika faktor seperti kurangnya sosialisasi politik, kesulitan mobilitas, atau ketidakpedulian politik yang membuat mereka enggan memberikan hak pilihnya dalam Pilkada.

3.4 Implikasi Partisipasi Kaum Boro dalam PILKADA

Tingkat partisipasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan proses demokrasi di Kabupaten Wonogiri. Partisipasi yang tinggi mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan daerah serta adanya kesadaran masyarakat terhadap kelangsungan daerahnya kedepan. Sebaliknya, rendahnya partisipasi dapat mengarah pada berbagai permasalahan demokratis berikut ini:

3.4.1 Ketimpangan dalam representasi politik

Ketidakhadiran sebagian pemilih dalam Pemilu dan Pilkada berpotensi menciptakan ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan yang seharusnya mencerminkan seluruh aspirasi dari masyarakat. Apabila yang berpartisipasi hanya sebagian kelompok masyarakat saja, maka hasil dari pemilihan tersebut cenderung hanya mencerminkan kepentingan kelompok itu saja dibandingkan kepentingan dari keseluruhan populasi. Hal ini akan berakibat pada adanya situasi di mana kebijakan yang dihasilkan kurang inklusi dan tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan dari semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memberikan hak suaranya dalam Pilkada.

Ketimpangan representasi politik ini juga dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Apabila hasil suara dari pemilihan merupakan suara dari sebagian kelompok yang aktif tadi, maka kepemimpinan yang terpilih cenderung lebih memperhatikan kepentingan kelompok tadi dan kelompok masyarakat yang tidak berpartisipasi mungkin kepentingannya akan lebih terabaikan. Akibatnya kebijakan pembangunan, distribusi anggaran serta program pemerintah dalam kesejahteraan sosial bisa menjadi tidak merata hingga memperlebar ketimpangan sosial yang sudah ada di masyarakat.

Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu menjadi hal yang cukup krusial untuk memastikan bahwa hasil dari pemilihan tersebut merupakan cerminan kehendak secara kolektif seluruh warga Kabupaten Wonogiri. Penyebaran informasi dan pemberian edukasi politik serta kemudahan bagi setiap pemilih dalam proses pemungutan suara perlu diperkuat lagi, agar masyarakat merasa bahwa suara mereka memiliki dampak yang nyata terhadap kelangsungan daerah mereka kedepan. Dengan demikian, harapannya demokrasi di Kabupaten Wonogiri dapat berjalan lebih inklusif dan berkeadilan serta dapat mencerminkan kepentingan di seluruh elemen masyarakat tanpa adanya ketimpangan dalam representasi politik.

3.4.2 Dampak terhadap legitimasi pemimpin

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada memiliki peran yang penting dalam menentukan legitimasi pemimpin yang terpilih. Apabila jumlah partisipasi dari masyarakat rendah maka hasil dari suara tersebut tidak dapat sepenuhnya mencerminkan kepentingan serta aspirasi seluruh masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai pertanyaan terkait seberapa besar legitimasi dan dukungan nyata yang dimiliki oleh pemimpin yang terpilih, mengingat bahwa pemimpin terpilih tersebut hanya memperoleh suara dari sebagian masyarakat saja, bukan

secara keseluruhan. Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak memerikan hak suaranya berisiko kepentingannya akan tidak terwakili dalam pemerintahan baru yang berjalan sehingga hal ini menyebabkan masyarakat yang tidak terpenuhi kepentingannya merasa tidak percaya dengan proses demokrasi dan keberjalanan pemerintah yang baru.

Legitimasi pemimpin yang lemah juga berdampak pada stabilitas pemerintahan dan efektivitas kebijakan yang diambil. Apabila pemimpin terpilih hanya didukung oleh sebagian kecil kelompok masyarakat, maka potensi munculnya ketidakpuasan bagi publik akan semakin besar. Masyarakat yang aspirasinya tidak terakomodasi dengan baik biasanya cenderung menjadi lebih kritis dan skeptis terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Ketidakpuasan dari masyarakat ini akan dapat berujung pada berkurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan publik, meningkatnya sikap apatis terhadap pemerintahan, serta adanya potensi muncul kritik, protes, atau bahkan bisa aksi penolakan yang pasti akan menghambat jalannya pemerintahan.

Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi meningkat dalam proses Pilkada, maka legitimasi pemimpin yang terpilih akan meningkat atau lebih kuat. Tingginya jumlah suara dalam pemilihan mencerminkan bahwa adanya aspirasi yang lebih luas dari masyarakat, sehingga pemimpin yang terpilih akan mendapatkan dukungan dan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang berjalan, karena mereka merasa bahwa pemimpin yang terpilih akan benar-benar merepresentasikan suara mayoritas. Selain itu, pemimpin dengan legitimasi yang kuat maka akan

memiliki posisi yang lebih stabil dalam menjalankan pemerintahannya dan dalam merumuskan kebijakan yang dapat dengan mudah diterima oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah serta penyelenggara Pilkada. Keterlibatan aktif masyarakat ini dapat didorong dengan pemberian edukasi politik, kemudahan akses terhadap informasi pemilu, serta memberikan penyelenggaraan pemilihan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan memastikan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, maka proses demokrasi dapat berjalan lebih sehat, pemimpin yang terpilih mendapat legitimasi yang kuat, serta kebijakan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan serta harapan dari seluruh masyarakat.